KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010011.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HALIMAH SA`DIYAH, SH , sesuai salinan Akta Nomor 17 Tanggal 17 Mei 2017, dan salinan Akta Nomor 33 Tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat oleh HALIMAH SA`DIYAH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN disingkat LP.K-P-K tanggal 22 Juni 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017062232101163 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN disingkat LP.K-P-K;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN disingkat LP.K-P-K
Berkedudukan di KOTA BEKASI, sesuai salinan Akta Nomor 17 Tanggal 17 Mei 2017, dan salinan Akta Nomor 33 Tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat oleh HALIMAH SA`DIYAH, SH , yang berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Juni 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 22 Juni 2017

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010011.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ANDI ARO	3276022809690008	PENGURUS	KETUA UMUM
JONI BANTERA,	3275051709650018	PENGURUS	SEKRETARIS JENDRAL
MULYANTI	3173015010830006	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
M. DJALI YUSUF	3175010809480002	PENGAWAS	KETUA
ISMAIL JS GOBEL	7571031909730002	PENGAWAS	ANGGOTA,

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Juni 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 22 Juni 2017

Dipindai dengan CamScanner